

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. PROGRAM : HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
3. SASARAN PROGRAM : 05 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan
06 - Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4. KEGIATAN : 2350 - Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 01 - Dit. Pengendalian Operasi Armada
04 - Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PSDKP		520.000,0
02.01	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	100	
03	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif		364.687.687,0
03.01	Indeks kinerja operasi pesawat patroli	95	
03.02	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	92	
03.03	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	92	
03.04	Indeks kesiapan logistik dan awak kapal pengawas	100	

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. PROGRAM

:

HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
3. SASARAN PROGRAM

:

03 - Meningkatnya efek jera sektor kelautan dan perikanan
4. KEGIATAN

:

2351 - Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

02 - Dit. Penanganan Pelanggaran

04 - Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan

06 - Sekretariat Ditjen PSDKP

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan		2.677.120,0
01.01	Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81	
01.02	Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif	81	
01.03	Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81	
01.04	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81	
01.05	Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaaan sanksi administratif	81	
02	Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan		1.220.000,0
02.01	Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
02.02	Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa	76	
03	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan		7.822.880,0
03.01	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	94	
03.02	Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	75	
03.03	Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain	71	
03.04	Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan	100	
04	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan		620.000,0
04.01	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran	100	
Total			12.340.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan</i>										2.677.120,0
01.BCE	Penanganan Perkara										2.677.120,0
01.BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif								000 - Bukan Tematik		2.677.120,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Persiapan Penaan Sanksi Administratif										231.000,0
		Pusat	Pusat								31.500,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								15.750,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								15.750,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								26.250,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								26.250,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								26.250,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								5.250,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								5.250,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								15.750,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								5.250,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								5.250,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								26.250,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								5.250,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								15.750,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								5.250,0
	052 - Pelaksanaan Penaan Sanksi Administratif										2.061.120,0
		Pusat	Pusat								532.120,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								107.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								97.500,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								162.500,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								142.500,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								142.500,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								102.500,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								92.500,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								97.500,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								92.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								92.500,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								116.500,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								92.500,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								97.500,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								92.500,0
	053 - Evaluasi Penaan Sanksi Administratif										385.000,0
		Pusat	Pusat								52.500,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								26.250,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								26.250,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								43.750,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								43.750,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								43.750,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								8.750,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								8.750,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								26.250,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								8.750,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								8.750,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								43.750,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								8.750,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								26.250,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								8.750,0
02	<i>Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan</i>										1.220.000,0
02.BCE	Penanganan Perkara										1.220.000,0
02.BCE.001	Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani								000 - Bukan Tematik		1.220.000,0
	051 - Perencanaan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani										20.000,0
		Pusat	Pusat								20.000,0
	052 - Pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani										1.170.000,0
		Pusat	Pusat								1.170.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Monev dan pelaporan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani										30.000,0
		Pusat	Pusat								30.000,0
03	<i>Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan</i>										7.822.880,0
03.AEA	Koordinasi										2.600.000,0
03.AEA.002	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan								000 - Bukan Tematik		2.600.000,0
	051 - Perencanaan/Persiapan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan										57.400,0
		Pusat	Pusat								15.400,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								3.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								3.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								3.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								3.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								3.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								3.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								3.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								3.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								3.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								3.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								3.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								3.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								3.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								3.000,0
	052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan										2.464.200,0
		Pusat	Pusat								1.169.200,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								92.500,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								92.500,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								92.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								92.500,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								92.500,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								92.500,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								92.500,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								92.500,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								92.500,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								92.500,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								92.500,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								92.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								92.500,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								92.500,0
	053 - Evaluasi Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan										78.400,0
		Pusat	Pusat								15.400,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								4.500,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								4.500,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								4.500,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								4.500,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								4.500,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								4.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								4.500,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								4.500,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								4.500,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								4.500,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								4.500,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								4.500,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								4.500,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								4.500,0
03.BCB	Perkara Hukum Lembaga										500.000,0
03.BCB.001	Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan								000 - Bukan Tematik		500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
	052 - perkaraPerkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan										300.000,0
		Pusat	Pusat								300.000,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
03.BCE	Penanganan Perkara										2.214.620,0
03.BCE.U04	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana								000 - Bukan Tematik		2.214.620,0
	051 - Ekspose Awal TPKP										126.000,0
		Pusat	Pusat								12.600,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								14.700,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								16.800,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								16.800,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								2.100,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								2.100,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								2.100,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								2.100,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								16.800,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								8.400,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								8.400,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								16.800,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								2.100,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								2.100,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								2.100,0
	052 - Pemberkasan Perkara TPKP										889.000,0
		Pusat	Pusat								254.900,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								39.050,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								33.200,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								53.200,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								24.150,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								24.150,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								24.150,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								24.150,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								63.200,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								86.600,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								86.600,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								103.200,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								24.150,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								24.150,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								24.150,0
	053 - Gelar Perkara TPKP										131.620,0
		Pusat	Pusat								18.220,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								14.700,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								16.800,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								16.800,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								2.100,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								2.100,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								2.100,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								2.100,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								16.800,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								8.400,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								8.400,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								16.800,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								2.100,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								2.100,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								2.100,0
	054 - Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP										465.000,0
		Pusat	Pusat								49.500,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								27.750,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								66.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								66.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								8.250,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								8.250,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								8.250,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								8.250,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								66.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								33.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								33.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								66.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								8.250,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								8.250,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								8.250,0
	055 - Penjagaan dan Logistik Penanganan Awak Kapal TPKP										603.000,0
		Pusat	Pusat								38.400,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								24.800,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								31.200,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								21.200,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								26.400,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								26.400,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								26.400,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								26.400,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								60.200,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								55.600,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								85.600,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								101.200,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								26.400,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								26.400,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								26.400,0
03.BKB	Pemantauan produk										2.508.260,0
03.BKB.001	Penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau								000 - Bukan Tematik		2.508.260,0
	051 - Perencanaan penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau										11.550,0
		Pusat	Pusat								11.550,0
	052 - Pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau										2.482.710,0
		Pusat	Pusat								2.482.710,0
	053 - Evaluasi penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau										14.000,0
		Pusat	Pusat								14.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04	<i>Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan</i>										620.000,0
04.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan										400.000,0
04.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan								000 - Bukan Tematik		400.000,0
	051 - Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan										15.000,0
		Pusat	Pusat								15.000,0
	052 - Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan										375.000,0
		Pusat	Pusat								375.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan										10.000,0
		Pusat	Pusat								10.000,0
04.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										220.000,0
04.AFA.001	NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran								000 - Bukan Tematik		220.000,0
	051 - Perencanaan Penyusunan Draft NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran										4.000,0
		Pusat	Pusat								4.000,0
	052 - Pelaksanaan Penyusunan Draft NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran										212.000,0
		Pusat	Pusat								212.000,0
	053 - Evaluasi Penyusunan Draft NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran										4.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								4.000,0
Total											12.340.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				2.677.120,0				6.886.000,0	6.886.000,0	6.886.000,0
01.BCE	Penanganan Perkara		Perkara		2.677.120,0				6.886.000,0	6.886.000,0	6.886.000,0
01.BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	89	Perkara		2.677.120,0	220	220	220	6.886.000,0	6.886.000,0	6.886.000,0
01.BCE.U03.051	Persiapan Pengenaan Sanksi Administratif	220,0	Perkara	1.050,0	231.000,0	220,0	220,0	220,0	231.000,0	231.000,0	231.000,0
01.BCE.U03.052	Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif	215,0	Perkara	9.586,6	2.061.120,0	265,0	220,0	220,0	6.270.000,0	6.270.000,0	6.270.000,0
01.BCE.U03.053	Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif	220,0	Perkara	1.750,0	385.000,0	265,0	220,0	220,0	385.000,0	385.000,0	385.000,0
02	Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan				1.220.000,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.BCE	Penanganan Perkara		Perkara		1.220.000,0				0,0	0,0	0,0
02.BCE.001	Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang ditangani	2	Perkara		1.220.000,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
02.BCE.001.051	Perencanaan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani	0,0	Laporan	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BCE.001.052	Pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani	0,0	Perkara	0,0	1.170.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BCE.001.053	Monev dan pelaporan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani	0,0	Laporan	0,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				7.822.880,0				20.497.570,0	20.931.570,0	21.395.570,0
03.AEA	Koordinasi		kegiatan		2.600.000,0				6.430.800,0	6.630.800,0	6.830.800,0
03.AEA.002	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	16	kegiatan		2.600.000,0	19	19	19	6.430.800,0	6.630.800,0	6.830.800,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03.AEA.002.051	Perencanaan/Persiapan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	19,0	Laporan	3.021,1	57.400,0	19,0	19,0	18,0	57.400,0	57.400,0	57.400,0
03.AEA.002.052	Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	18,0	Kegiatan	136.900,0	2.464.200,0	19,0	19,0	18,0	6.295.000,0	6.495.000,0	6.695.000,0
03.AEA.002.053	Evaluasi Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	17,0	Laporan	4.611,8	78.400,0	28,0	19,0	18,0	78.400,0	78.400,0	78.400,0
03.BCB	Perkara Hukum Lembaga		Perkara		500.000,0				560.000,0	590.000,0	650.000,0
03.BCB.001	Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	6	Perkara		500.000,0	10	10	10	560.000,0	590.000,0	650.000,0
03.BCB.001.051	Perencanaan Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	0,0	Laporan	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	120.000,0	130.000,0	150.000,0
03.BCB.001.052	perkaraPerkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	0,0	Perkara	0,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	320.000,0	330.000,0	350.000,0
03.BCB.001.053	Monitoring dan Evaluasi Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	0,0	Laporan	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	120.000,0	130.000,0	150.000,0
03.BCE	Penanganan Perkara		Perkara		2.214.620,0				7.366.770,0	7.366.770,0	7.366.770,0
03.BCE.U04	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	24	Perkara		2.214.620,0	60	60	60	7.366.770,0	7.366.770,0	7.366.770,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03.BCE.U04.051	Ekspose Awal TPKP	60,0	Perkara	2.100,0	126.000,0	60,0	60,0	60,0	112.770,0	112.770,0	112.770,0
03.BCE.U04.052	Pemberkasan Perkara TPKP	52,0	Perkara	17.096,2	889.000,0	60,0	60,0	52,0	3.249.000,0	3.249.000,0	3.249.000,0
03.BCE.U04.053	Gelar Perkara TPKP	60,0	Perakra	2.193,7	131.620,0	60,0	60,0	53,0	126.000,0	126.000,0	126.000,0
03.BCE.U04.054	Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP	60,0	Perkara	7.750,0	465.000,0	60,0	60,0	60,0	495.000,0	495.000,0	495.000,0
03.BCE.U04.055	Penjagaan dan Logistik Penanganan Awak Kapal TPKP	56,0	Perkara	10.767,9	603.000,0	60,0	60,0	60,0	3.384.000,0	3.384.000,0	3.384.000,0
03.BKB	Pemantauan produk		Produk		2.508.260,0				6.140.000,0	6.344.000,0	6.548.000,0
03.BKB.001	Penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau	12	laporan		2.508.260,0	12	12	12	6.140.000,0	6.344.000,0	6.548.000,0
03.BKB.001.051	Perencanaan penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau	48,0	Laporan	240,6	11.550,0	48,0	48,0	48,0	20.000,0	22.000,0	24.000,0
03.BKB.001.052	Pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau	48,0	Laporan	51.723,1	2.482.710,0	48,0	48,0	48,0	6.100.000,0	6.300.000,0	6.500.000,0
03.BKB.001.053	Evaluasi penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau	48,0	Laporan	291,7	14.000,0	48,0	48,0	48,0	20.000,0	22.000,0	24.000,0
04	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan				620.000,0				600.000,0	700.000,0	800.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
04.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		Rekomendasi Kebijakan		400.000,0				400.000,0	400.000,0	400.000,0
04.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	2	Rekomendasi Kebijakan		400.000,0	2	2	2	400.000,0	400.000,0	400.000,0
04.ABW.001.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	2,0	Laporan	7.500,0	15.000,0	2,0	2,0	2,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0
04.ABW.001.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	2,0	Rekomendasi Kebijakan	187.500,0	375.000,0	2,0	2,0	2,0	375.000,0	375.000,0	375.000,0
04.ABW.001.053	Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	2,0	Laporan	5.000,0	10.000,0	2,0	2,0	2,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
04.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK		220.000,0				200.000,0	300.000,0	400.000,0
04.AFA.001	NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran	1	NSPK		220.000,0	2	3	4	200.000,0	300.000,0	400.000,0
04.AFA.001.051	Perencanaan Penyusunan Draft NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran	4,0	Laporan	1.000,0	4.000,0	2,0	3,0	4,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
04.AFA.001.052	Pelaksanaan Penyusunan Draft NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran	4,0	NSPK	53.000,0	212.000,0	2,0	3,0	4,0	190.000,0	290.000,0	390.000,0
04.AFA.001.053	Evaluasi Penyusunan Draft NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran	4,0	Laporan	1.000,0	4.000,0	2,0	3,0	4,0	6.150,0	6.150,0	6.150,0
Total					12.340.000,0	-	-	-	27.983.570,0	28.517.570,0	29.081.570,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan		2.677.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.677.120,0
01.BCE	Penanganan Perkara		2.677.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.677.120,0
01.BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif		2.677.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.677.120,0
01.BCE.U03.051	Persiapan Pengenaan Sanksi Administratif	Pendukung	231.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231.000,0
01.BCE.U03.052	Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif	Utama	2.061.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.061.120,0
01.BCE.U03.053	Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif	Pendukung	385.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385.000,0
02	Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan		1.220.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.220.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.BCE	Penanganan Perkara		1.220.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.220.000,0
02.BCE.001	Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani		1.220.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.220.000,0
02.BCE.001.051	Perencanaan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani	Pendukung	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
02.BCE.001.052	Pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani	Pendukung	1.170.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170.000,0
02.BCE.001.053	Monev dan pelaporan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani	Pendukung	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
03	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan		7.822.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.822.880,0
03.AEA	Koordinasi		2.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.600.000,0
03.AEA.002	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan		2.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.600.000,0
03.AEA.002.051	Perencanaan/Persiapan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	Pendukung	57.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57.400,0
03.AEA.002.052	Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	Utama	2.464.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.464.200,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.AEA.002.053	Evaluasi Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	Pendukung	78.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78.400,0
03.BCB	Perkara Hukum Lembaga		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
03.BCB.001	Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
03.BCB.001.051	Perencanaan Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
03.BCB.001.052	perkaraPerkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
03.BCB.001.053	Monitoring dan Evaluasi Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
03.BCE	Penanganan Perkara		2.214.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.214.620,0
03.BCE.U04	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana		2.214.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.214.620,0
03.BCE.U04.051	Ekspose Awal TPKP	Utama	126.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126.000,0
03.BCE.U04.052	Pemberkasan Perkara TPKP	Utama	889.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	889.000,0
03.BCE.U04.053	Gelar Perkara TPKP	Utama	131.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.620,0
03.BCE.U04.054	Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP	Utama	465.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465.000,0
03.BCE.U04.055	Penjagaan dan Logistik Penanganan Awak Kapal TPKP	Utama	603.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	603.000,0
03.BKB	Pemantauan produk		2.508.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.508.260,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.BKB.001	Penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau		2.508.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.508.260,0
03.BKB.001.051	Perencanaan penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau	Pendukung	11.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.550,0
03.BKB.001.052	Pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau	Utama	2.482.710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.482.710,0
03.BKB.001.053	Evaluasi penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau	Pendukung	14.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.000,0
04	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan		620.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620.000,0
04.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
04.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
04.ABW.001.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Pendukung	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0
04.ABW.001.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Utama	375.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375.000,0
04.ABW.001.053	Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Pendukung	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
04.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		220.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.AFA.001	NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran		220.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220.000,0
04.AFA.001.051	Perencanaan Penyusunan Draft NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran	Pendukung	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
04.AFA.001.052	Pelaksanaan Penyusunan Draft NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran	Utama	212.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212.000,0
04.AFA.001.053	Evaluasi Penyusunan Draft NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran	Pendukung	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
Total			12.340.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.340.000,0

Jakarta, 24 April 2025

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. PROGRAM

:

HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
3. SASARAN PROGRAM

:

05 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan
4. KEGIATAN

:

2352 - Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

01 - Dit. Pengendalian Operasi Armada

03 - Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan

04 - Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan		14.320.112,0
01.01	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan	82	
01.02	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan	100	
01.03	Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan	82	
01.04	Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan	62	
02	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi		5.673.313,0
02.01	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI	100	
02.02	Tingkat akurasi dan validitas analisis hasil pemantauan SDKP	75	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
02.03	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	82	
03	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif		3.856.396,0
03.01	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan	75	
03.02	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan	75	
04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan		19.115.780,0
04.01	Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan	82	
04.02	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan	100	
04.03	Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan	82	
04.04	Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan	62	
06	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		440.000,0
06.01	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	
Total			43.405.601,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan</i>										14.320.1
01.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan										400.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan								000 - Bukan Tematik		400.00
	051 - Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan										50.00
		Pusat	Pusat								50.00
	052 - Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan										300.00
		Pusat	Pusat								300.00
	053 - Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan										50.00
		Pusat	Pusat								50.00
01.AEA	Koordinasi										1.923.70
01.AEA.001	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan								000 - Bukan Tematik		1.923.70
	051 - Persiapan koordinasi pengawasan sumberdaya kelautan										123.70

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								123.75
	052 - Pelaksanaan koordinasi pengawasan sumberdaya kelautan										1.700.00
		Pusat	Pusat								1.700.00
	053 - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan koordinasi Pengawasan Kelautan										100.00
		Pusat	Pusat								100.00
01.BII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan										700.00
01.BII.001	Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan								000 - Bukan Tematik		200.00
	051 - Perencanaan/persiapan pemeriksaan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diaudit										50.00
		Pusat	Pusat								50.00
	052 - Pelaksanaan pemeriksaan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diaudit										100.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								100.00
	053 - Monev dan pelaporan pemeriksaan pemeriksaan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diaudit										50.00
		Pusat	Pusat								50.00
01.BII.002	Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan								000 - Bukan Tematik		500.00
	051 - Perencanaan/persiapan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan										28.00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								2.00
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								2.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								2.00
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								2.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								2.00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								2.00
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								2.00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								2.00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								2.00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								2.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								2.00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								2.00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								2.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								2.00
	052 - Pelaksanaan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan										444.00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								41.00
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								31.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								31.00
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								31.00
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								31.00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								31.00
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								31.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								31.00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								31.00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								31.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								31.00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								31.00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								31.00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								31.00
	053 - Monev dan pelaporan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan										28.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								2.00
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								2.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								2.00
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								2.00
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								2.00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								2.00
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								2.00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								2.00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								2.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								2.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								2.00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								2.00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								2.00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								2.00
01.BKB	Pemantauan produk										2.200.00
01.BKB.001	Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan yang dipantau								000 - Bukan Tematik		2.200.00
	051 - Perencanaan layanan pemantauan hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan										100.00
		Pusat	Pusat								100.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Layanan pemantauan hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan										1.800.00
		Pusat	Pusat								1.800.00
	053 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan Sumberdaya Kelautan										200.00
		Pusat	Pusat								200.00
	054 - Bimbingan Teknis pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan										100.00
		Pusat	Pusat								100.00
01.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah										592.00
01.FBA.001	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan								000 - Bukan Tematik		592.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan										42.00
		Pusat	Pusat								42.00
	052 - Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan										500.00
		Pusat	Pusat								500.00
	053 - Monev dan pelaporan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan										50.00
		Pusat	Pusat								50.00
01.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga										8.504.30

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru	Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	004 - Mitigasi perubahan iklim		8.504.30
	051 - Perencanaan/persiapan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya										300.00
		Pusat	Pusat								20.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJII PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								20.00
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								20.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								20.00
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								20.00
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								20.00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								20.00
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								20.00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								20.00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								20.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								20.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								20.00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								20.00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								20.00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								20.00
	052 - Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya										7.904.30
		Pusat	Pusat								1.404.30
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								400.00
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								600.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								90.00
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								450.00
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								500.00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								600.00
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								450.00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								500.00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								600.00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								500.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								460.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								450.00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								400.00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								500.00
	053 - Monev dan pelaporan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya										300.00
		Pusat	Pusat								20.00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								20.00
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								20.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								20.00
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								20.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								20.00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								20.00
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								20.00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								20.00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								20.00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								20.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								20.00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								20.00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								20.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								20.00
	054 - Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya (ABT)										
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								
02	<i>Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi</i>										5.673.3
02.ACA	Perizinan Produk										1.600.00
02.ACA.001	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan								000 - Bukan Tematik		1.600.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Persiapan/Perencanaan perizinan SKAT										100.00
		Pusat	Pusat								100.00
	052 - Pelaksanaan perizinan SKAT										1.400.00
		Pusat	Pusat								1.400.00
	053 - Monitoring dan Evaluasi perizinan SKAT										100.00
		Pusat	Pusat								100.00
02.RDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										4.073.30

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02.RDS.001	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru	Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	000 - Bukan Tematik		4.073.3
	051 - Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pemantauan SDKP										300.00
		Pusat	Pusat								300.00
	052 - Operasional Sistem Pemantauan SDKP										2.773.3
		Pusat	Pusat								2.773.3

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Pemeliharaan Sistem Pemantauan SDKP										1.000.00
		Pusat	Pusat								1.000.00
03	<i>Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif</i>										3.856.30
03.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam										3.856.30
03.BHD.001	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan								000 - Bukan Tematik		2.991.30
	051 - Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan										72.00
		Pusat	Pusat								8.50
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								4.50
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								4.50
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								4.50

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								4.50
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								4.50
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								4.50
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								4.50
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								4.50
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								4.50
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								4.50
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								5.00
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								4.50

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								4.50
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								4.50
	052 - Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan										2.847.30
		Pusat	Pusat								898.50
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								100.00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								100.00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								225.00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								225.00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								100.00
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								150.70

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								148.00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								100.00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								100.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								100.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								300.00
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								100.00
		Provinsi Maluku	Kota Tual								100.00
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								100.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan										72.00
		Pusat	Pusat								8.50
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								4.50
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								4.50
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								4.50
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								4.50
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								4.50
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								4.50
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								4.50

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								4.50
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								4.50
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								4.50
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								5.00
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								4.50
		Provinsi Maluku	Kota Tual								4.50
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								4.50
03.BHD.002	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan								000 - Bukan Tematik		865.00
	051 - Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan										140.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								10.00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								10.00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								10.00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								10.00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								10.00
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								10.00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								10.00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								10.00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								10.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								10.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								10.00
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								10.00
		Provinsi Maluku	Kota Tual								10.00
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								10.00
	052 - Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan										585.00
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								41.70
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								41.70
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								41.70

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								41.79
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								41.79
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								41.79
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								41.79
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								41.79
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								41.79
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								41.79
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								41.79
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								41.79

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								41.79
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								41.79
	053 - Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan										140.00
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								10.00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								10.00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								10.00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								10.00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								10.00
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								10.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								10.00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								10.00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								10.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								10.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								10.00
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								10.00
		Provinsi Maluku	Kota Tual								10.00
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								10.00
04	<i>Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan</i>										19.115.70

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan										400.00
04.ABW.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan								000 - Bukan Tematik		400.00
	051 - Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan										50.00
		Pusat	Pusat								50.00
	052 - Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan										300.00
		Pusat	Pusat								300.00
	053 - Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan										50.00
		Pusat	Pusat								50.00
04.AEA	Koordinasi										1.923.70
04.AEA.002	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan								000 - Bukan Tematik		1.923.70

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan koordinasi pengawasan sumber daya perikanan										123.70
		Pusat	Pusat								123.70
	052 - Pelaksanaan koordinasi pengawasan sumber daya perikanan										1.700.00
		Pusat	Pusat								1.700.00
	053 - Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Pengawasan sumber daya Perikanan										100.00
		Pusat	Pusat								100.00
04.BKB	Pemantauan produk										2.200.00
04.BKB.002	Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan yang dipantau								000 - Bukan Tematik		2.200.00
	051 - Perencanaan layanan pemantauan hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan										100.00
		Pusat	Pusat								100.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Layanan pemantauan hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan										2.000.00
		Pusat	Pusat								2.000.00
	053 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan Sumber Daya Perikanan										100.00
		Pusat	Pusat								100.00
04.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah										592.00
04.FBA.002	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan								000 - Bukan Tematik		592.00
	051 - Perencanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan										42.00
		Pusat	Pusat								42.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan										500.00
		Pusat	Pusat								500.00
	053 - Monev dan pelaporan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan										50.00
		Pusat	Pusat								50.00
04.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga										14.000.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04.QIC.002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru	Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	000 - Bukan Tematik		14.000.00
	051 - Perencanaan/persiapan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan										1.700.00
		Pusat	Pusat								500.00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								100.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								100.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								100.00
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								50.00
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								50.00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								100.00
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								50.00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								100.00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								50.00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								100.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								100.00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								100.00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								100.00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								100.00
	052 - Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan										10.600.00
		Pusat	Pusat								1.000.00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								800.00
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								800.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								800.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								400.00
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								400.00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								800.00
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								400.00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								800.00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								400.00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								800.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								800.00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								800.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								800.00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								800.00
	053 - Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan										1.700.00
		Pusat	Pusat								500.00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								100.00
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								100.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								100.00
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								50.00
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								50.00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								100.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJII PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								50.00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								100.00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								50.00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								100.00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								100.00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								100.00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								100.00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								100.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
06	<i>Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>										440.00
06.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										440.00
06.AFA.001	NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan								000 - Bukan Tematik		220.00
	051 - Persiapan penyusunan NSPK Bidang Pengawasan SDK										20.00
		Pusat	Pusat								20.00
	052 - penyusunan NSPK Bidang Pengawasan SDK										200.00
		Pusat	Pusat								200.00
06.AFA.002	NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan								000 - Bukan Tematik		220.00
	051 - Perencanaan draft/rancangan NSPK										50.00
		Pusat	Pusat								50.00

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKA (RP RIB
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Penyusunan draft/rancangan NSPK										70.00
		Pusat	Pusat								70.00
	053 - Uji Petik draft/rancangan NSPK										70.00
		Pusat	Pusat								70.00
	054 - Monitoring dan Evaluasi NSPK										30.00
		Pusat	Pusat								30.00
Total											43.405.60

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan				14.320.112,0				31.610.800,0	37.294.000,0	41.179.012,0
01.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		Rekomendasi Kebijakan		400.000,0				420.000,0	460.000,0	470.000,0
01.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	2	Rekomendasi Kebijakan		400.000,0	2	3	3	420.000,0	460.000,0	470.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.ABW.001.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	2,0	Rekomendasi Kebijakan	25.000,0	50.000,0	2,0	3,0	3,0	50.000,0	55.000,0	60.000,0
01.ABW.001.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	2,0	Rekomendasi Kebijakan	150.000,0	300.000,0	2,0	3,0	3,0	320.000,0	350.000,0	350.000,0
01.ABW.001.053	Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	2,0	Rekomendasi Kebijakan	25.000,0	50.000,0	2,0	3,0	3,0	50.000,0	55.000,0	60.000,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		1.923.780,0				7.000.000,0	8.000.000,0	9.000.000,0
01.AEA.001	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	2	kegiatan		1.923.780,0	2	2	2	7.000.000,0	8.000.000,0	9.000.000,0
01.AEA.001.051	Persiapan koordinasi pengawasan sumberdaya kelautan	5,0	kegiatan	24.756,0	123.780,0	5,0	5,0	5,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0
01.AEA.001.052	Pelaksanaan koordinasi pengawasan sumberdaya kelautan	5,0	kegiatan	340.000,0	1.700.000,0	5,0	5,0	5,0	6.000.000,0	7.000.000,0	8.000.000,0
01.AEA.001.053	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan koordinasi Pengawasan Kelautan	5,0	kegiatan	20.000,0	100.000,0	5,0	5,0	5,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0
01.BII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan		Hektar/ Layanan		700.000,0				1.380.800,0	1.514.000,0	1.439.012,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BII.001	Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan	1	Laporan		200.000,0	1	1	1	340.000,0	390.000,0	390.000,0
01.BII.001.051	Perencanaan/persiapan pemeriksaan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diaudit	1,0	Kegiatan	50.000,0	50.000,0	1,0	1,0	1,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
01.BII.001.052	Pelaksanaan pemeriksaan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diaudit	1,0	Kegiatan	100.000,0	100.000,0	1,0	1,0	1,0	300.000,0	350.000,0	350.000,0
01.BII.001.053	Monev dan pelaporan pemeriksaan pemeriksaan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diaudit	1,0	Kegiatan	50.000,0	50.000,0	1,0	1,0	1,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
01.BII.002	Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	28	Laporan		500.000,0	28	28	28	1.040.800,0	1.124.000,0	1.049.012,0
01.BII.002.051	Perencanaan/persiapan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	62,0	Laporan	451,6	28.000,0	145,0	210,0	195,0	29.400,0	36.000,0	33.504,0
01.BII.002.052	Pelaksanaan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	62,0	Laporan	7.161,3	444.000,0	145,0	210,0	195,0	982.000,0	1.052.000,0	982.004,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BII.002.053	Monev dan pelaporan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	62,0	Laporan	451,6	28.000,0	145,0	210,0	195,0	29.400,0	36.000,0	33.504,0
01.BKB	Pemantauan produk		Produk		2.200.000,0				7.660.000,0	9.160.000,0	10.660.000,0
01.BKB.001	Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan yang dipantau	12	laporan		2.200.000,0	12	12	12	7.660.000,0	9.160.000,0	10.660.000,0
01.BKB.001.051	Perencanaan layanan pemantauan hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan	12,0	Kegiatan	8.333,3	100.000,0	12,0	12,0	12,0	160.000,0	160.000,0	160.000,0
01.BKB.001.052	Pelaksanaan Layanan pemantauan hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan	12,0	kegiatan	150.000,0	1.800.000,0	12,0	12,0	12,0	3.500.000,0	4.000.000,0	4.500.000,0
01.BKB.001.053	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan Sumberdaya Kelautan	12,0	Kegiatan	16.666,7	200.000,0	12,0	12,0	12,0	2.500.000,0	3.000.000,0	3.500.000,0
01.BKB.001.054	Bimbingan Teknis pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan	12,0	Kegiatan	8.333,3	100.000,0	12,0	12,0	12,0	1.500.000,0	2.000.000,0	2.500.000,0
01.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Provinsi/ Kab/Kota		592.000,0				2.560.000,0	3.580.000,0	4.090.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.FBA.001	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	20	Daerah (Prov/Kab/Kota)		592.000,0	20	25	30	2.560.000,0	3.580.000,0	4.090.000,0
01.FBA.001.051	Perencanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	15,0	Kegiatan	2.800,0	42.000,0	20,0	25,0	30,0	30.000,0	40.000,0	45.000,0
01.FBA.001.052	Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	15,0	Kegiatan	33.333,3	500.000,0	20,0	25,0	30,0	2.500.000,0	3.500.000,0	4.000.000,0
01.FBA.001.053	Monev dan pelaporan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	15,0	Dokumen	3.333,3	50.000,0	20,0	25,0	30,0	30.000,0	40.000,0	45.000,0
01.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		Lembaga		8.504.332,0				12.590.000,0	14.580.000,0	15.520.000,0
01.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	754	Lembaga		8.504.332,0	872	993	1099	12.590.000,0	14.580.000,0	15.520.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.QIC.001.051	Perencanaan/persiapan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	754,0	Dokumen	397,9	300.000,0	872,0	993,0	1.099,0	425.000,0	550.000,0	650.000,0
01.QIC.001.052	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	754,0	Kegiatan	10.483,2	7.904.332,0	872,0	993,0	1.099,0	11.740.000,0	13.480.000,0	14.220.000,0
01.QIC.001.053	Monev dan pelaporan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	754,0	dokumen	397,9	300.000,0	872,0	993,0	1.099,0	425.000,0	550.000,0	650.000,0
01.QIC.001.054	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya (ABT)	0,0	kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi				5.673.313,0				1.630.000,0	1.660.000,0	1.690.000,0
02.ACA	Perizinan Produk		Produk		1.600.000,0				1.630.000,0	1.660.000,0	1.690.000,0
02.ACA.001	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	5000	Produk		1.600.000,0	5000	5000	5000	1.630.000,0	1.660.000,0	1.690.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.ACA.001.051	Persiapan/Perencanaan perizinan SKAT	1,0	Produk	100.000,0	100.000,0	1,0	1,0	1,0	110.000,0	120.000,0	130.000,0
02.ACA.001.052	Pelaksanaan perizinan SKAT	5.000,0	Produk	280,0	1.400.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	1.410.000,0	1.420.000,0	1.430.000,0
02.ACA.001.053	Monitoring dan Evaluasi perizinan SKAT	1,0	Produk	100.000,0	100.000,0	1,0	1,0	1,0	110.000,0	120.000,0	130.000,0
02.RDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit/ Kab/Kota/ Kecamatan/ Titik/Lokasi		4.073.313,0				0,0	0,0	0,0
02.RDS.001	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	1	Unit		4.073.313,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.RDS.001.051	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pemantauan SDKP	0,0	laporan	0,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.RDS.001.052	Operasional Sistem Pemantauan SDKP	0,0	unit	0,0	2.773.313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.RDS.001.053	Pemeliharaan Sistem Pemantauan SDKP	0,0	unit	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif				3.856.396,0				6.224.000,0	5.254.000,0	5.006.500,0
03.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		Operasi		3.856.396,0				6.224.000,0	5.254.000,0	5.006.500,0
03.BHD.001	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	24	Operasi		2.991.336,0	36	35	36	5.244.000,0	5.254.000,0	5.006.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03.BHD.001.051	Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	34,0	Laporan	2.117,6	72.000,0	50,0	50,0	50,0	84.500,0	89.500,0	89.500,0
03.BHD.001.052	Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	34,0	operasi	83.745,2	2.847.336,0	50,0	50,0	50,0	5.075.000,0	5.075.000,0	4.827.500,0
03.BHD.001.053	Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	34,0	Laporan	2.117,6	72.000,0	50,0	50,0	50,0	84.500,0	89.500,0	89.500,0
03.BHD.002	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	14	Operasi		865.060,0	14	14	14	980.000,0	0,0	0,0
03.BHD.002.051	Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	0,0	Laporan	0,0	140.000,0	0,0	0,0	0,0	140.000,0	0,0	0,0
03.BHD.002.052	Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	0,0	Operasi	0,0	585.060,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0	0,0	0,0
03.BHD.002.053	Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	0,0	Laporan	0,0	140.000,0	0,0	0,0	0,0	140.000,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan				19.115.780,0				21.705.000,0	20.300.000,0	20.825.000,0
04.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		Rekomendasi Kebijakan		400.000,0				420.000,0	430.000,0	470.000,0
04.ABW.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	2	Rekomendasi Kebijakan		400.000,0	2	3	3	420.000,0	430.000,0	470.000,0
04.ABW.002.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	2,0	Rekomendasi Kebijakan	25.000,0	50.000,0	3,0	3,0	4,0	55.000,0	55.000,0	60.000,0
04.ABW.002.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	2,0	Rekomendasi Kebijakan	150.000,0	300.000,0	3,0	3,0	4,0	310.000,0	320.000,0	350.000,0
04.ABW.002.053	Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	2,0	Rekomendasi Kebijakan	25.000,0	50.000,0	3,0	3,0	4,0	55.000,0	55.000,0	60.000,0
04.AEA	Koordinasi		kegiatan		1.923.780,0				1.925.000,0	1.950.000,0	1.975.000,0
04.AEA.002	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan	2	kegiatan		1.923.780,0	2	2	2	1.925.000,0	1.950.000,0	1.975.000,0
04.AEA.002.051	Perencanaan koordinasi pengawasan sumber daya perikanan	0,0	Laporan	0,0	123.780,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
04.AEA.002.052	Pelaksanaan koordinasi pengawasan sumber daya perikanan	0,0	Laporan	0,0	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	1.725.000,0	1.750.000,0	1.775.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
04.AEA.002.053	Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Pengawasan sumber daya Perikanan	0,0	Laporan	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
04.BKB	Pemantauan produk		Produk		2.200.000,0				2.300.000,0	2.400.000,0	2.500.000,0
04.BKB.002	Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan yang dipantau	12	laporan		2.200.000,0	12	12	12	2.300.000,0	2.400.000,0	2.500.000,0
04.BKB.002.051	Perencanaan layanan pemantauan hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	0,0	laporan	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
04.BKB.002.052	Pelaksanaan Layanan pemantauan hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	0,0	Laporan	0,0	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	2.100.000,0	2.200.000,0	2.300.000,0
04.BKB.002.053	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	0,0	Laporan	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
04.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Provinsi/ Kab/Kota		592.000,0				635.000,0	675.000,0	715.000,0
04.FBA.002	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	15	Provinsi		592.000,0	15	15	15	635.000,0	675.000,0	715.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
04.FBA.002.051	Perencanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	0,0	Laporan	0,0	42.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	55.000,0	60.000,0
04.FBA.002.052	Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	0,0	Pemerintah Daerah	0,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	525.000,0	550.000,0	575.000,0
04.FBA.002.053	Monev dan pelaporan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	0,0	Laporan	0,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	60.000,0	70.000,0	80.000,0
04.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		Lembaga		14.000.000,0				16.425.000,0	14.845.000,0	15.165.000,0
04.QIC.002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	1000	Lembaga		14.000.000,0	1000	1000	1000	16.425.000,0	14.845.000,0	15.165.000,0
04.QIC.002.051	Perencanaan/persiapan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	800,0	Lembaga	2.125,0	1.700.000,0	800,0	800,0	800,0	1.900.000,0	1.710.000,0	1.720.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
04.QIC.002.052	Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	800,0	Lembaga	13.250,0	10.600.000,0	800,0	800,0	800,0	12.625.000,0	11.425.000,0	11.725.000,0
04.QIC.002.053	Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	800,0	Lembaga	2.125,0	1.700.000,0	800,0	800,0	800,0	1.900.000,0	1.710.000,0	1.720.000,0
06	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				440.000,0				960.000,0	1.130.000,0	1.300.000,0
06.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK		440.000,0				960.000,0	1.130.000,0	1.300.000,0
06.AFA.001	NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1	NSPK		220.000,0	1	1	1	700.000,0	800.000,0	900.000,0
06.AFA.001.051	Persiapan penyusunan NSPK Bidang Pengawasan SDK	4,0	dokumen	5.000,0	20.000,0	4,0	4,0	4,0	60.000,0	60.000,0	60.000,0
06.AFA.001.052	penyusunan NSPK Bidang Pengawasan SDK	4,0	dokumen	50.000,0	200.000,0	4,0	4,0	4,0	640.000,0	740.000,0	840.000,0
06.AFA.002	NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1	NSPK		220.000,0	1	1	1	260.000,0	330.000,0	400.000,0
06.AFA.002.051	Perencanaan draft/rancangan NSPK	0,0	Laporan	0,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	75.000,0	100.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
06.AFA.002.052	Penyusunan draft/rancangan NSPK	0,0	NSPK	0,0	70.000,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0	90.000,0	100.000,0
06.AFA.002.053	Uji Petik draft/rancangan NSPK	0,0	Laporan	0,0	70.000,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0	90.000,0	100.000,0
06.AFA.002.054	Monitoring dan Evaluasi NSPK	0,0	Laporan	0,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	75.000,0	100.000,0
Total					43.405.601,0	-	-	-	62.129.800,0	65.638.000,0	70.000.512,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan		14.320.112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.320.112,0
01.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.ABW.001.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.ABW.001.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	Pendukung	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.ABW.001.053	Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.AEA	Koordinasi		1.923.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.923.780,0
01.AEA.001	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan		1.923.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.923.780,0
01.AEA.001.051	Persiapan koordinasi pengawasan sumberdaya kelautan	Pendukung	123.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123.780,0
01.AEA.001.052	Pelaksanaan koordinasi pengawasan sumberdaya kelautan	Utama	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0
01.AEA.001.053	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan koordinasi Pengawasan Kelautan	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.BII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan		700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
01.BII.001	Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
01.BII.001.051	Perencanaan/persiapan pemeriksaan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diaudit	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.BII.001.052	Pelaksanaan pemeriksaan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diaudit	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.BII.001.053	Monev dan pelaporan pemeriksaan pemeriksaan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diaudit	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.BII.002	Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.BII.002.051	Perencanaan/persiapan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	Pendukung	28.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.000,0
01.BII.002.052	Pelaksanaan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	Utama	444.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.BII.002.053	Monev dan pelaporan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	Pendukung	28.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.000,0
01.BKB	Pemantauan produk		2.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200.000,0
01.BKB.001	Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan yang dipantau		2.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200.000,0
01.BKB.001.051	Perencanaan layanan pemantauan hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.BKB.001.052	Pelaksanaan Layanan pemantauan hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan	Utama	1.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800.000,0
01.BKB.001.053	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan Sumberdaya Kelautan	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
01.BKB.001.054	Bimbingan Teknis pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		592.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592.000,0
01.FBA.001	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan		592.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592.000,0
01.FBA.001.051	Perencanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	Pendukung	42.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.000,0
01.FBA.001.052	Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	Utama	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.FBA.001.053	Monev dan pelaporan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		8.504.332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.504.332,0
01.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya		8.504.332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.504.332,0
01.QIC.001.051	Perencanaan/persiapan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.QIC.001.052	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	Utama	7.904.332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.904.332,0
01.QIC.001.053	Monev dan pelaporan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.QIC.001.054	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya (ABT)	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi		5.673.313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.673.313,0
02.ACA	Perizinan Produk		1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0
02.ACA.001	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan		1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0
02.ACA.001.051	Persiapan/Perencanaan perizinan SKAT	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
02.ACA.001.052	Pelaksanaan perizinan SKAT	Pendukung	1.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.ACA.001.053	Monitoring dan Evaluasi perizinan SKAT	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
02.RDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		4.073.313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.073.313,0
02.RDS.001	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional		4.073.313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.073.313,0
02.RDS.001.051	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pemantauan SDKP	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
02.RDS.001.052	Operasional Sistem Pemantauan SDKP	Utama	2.773.313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.773.313,0
02.RDS.001.053	Pemeliharaan Sistem Pemantauan SDKP	Utama	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
03	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif		3.856.396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.856.396,0
03.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		3.856.396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.856.396,0
03.BHD.001	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan		2.991.336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.991.336,0
03.BHD.001.051	Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Pendukung	72.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72.000,0
03.BHD.001.052	Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Utama	2.847.336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.847.336,0
03.BHD.001.053	Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Pendukung	72.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72.000,0
03.BHD.002	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan		865.060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	865.060,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.BHD.002.051	Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Pendukung	140.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140.000,0
03.BHD.002.052	Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Utama	585.060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585.060,0
03.BHD.002.053	Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Pendukung	140.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140.000,0
04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan		19.115.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.115.780,0
04.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
04.ABW.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
04.ABW.002.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
04.ABW.002.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	Pendukung	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
04.ABW.002.053	Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
04.AEA	Koordinasi		1.923.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.923.780,0
04.AEA.002	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan		1.923.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.923.780,0
04.AEA.002.051	Perencanaan koordinasi pengawasan sumber daya perikanan	Pendukung	123.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123.780,0
04.AEA.002.052	Pelaksanaan koordinasi pengawasan sumber daya perikanan	Pendukung	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.AEA.002.053	Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Pengawasan sumber daya Perikanan	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
04.BKB	Pemantauan produk		2.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200.000,0
04.BKB.002	Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan yang dipantau		2.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200.000,0
04.BKB.002.051	Perencanaan layanan pemantauan hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
04.BKB.002.052	Pelaksanaan Layanan pemantauan hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	Pendukung	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0
04.BKB.002.053	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
04.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		592.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592.000,0
04.FBA.002	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan		592.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592.000,0
04.FBA.002.051	Perencanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	Pendukung	42.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.000,0
04.FBA.002.052	Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	Pendukung	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
04.FBA.002.053	Monev dan pelaporan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		14.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.000.000,0
04.QIC.002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya		14.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.000.000,0
04.QIC.002.051	Perencanaan/persiapan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	Pendukung	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0
04.QIC.002.052	Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	Utama	10.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.600.000,0
04.QIC.002.053	Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	Pendukung	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0
06	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		440.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440.000,0
06.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		440.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440.000,0
06.AFA.001	NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan		220.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220.000,0
06.AFA.001.051	Persiapan penyusunan NSPK Bidang Pengawasan SDK	Pendukung	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
06.AFA.001.052	penyusunan NSPK Bidang Pengawasan SDK	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
06.AFA.002	NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan		220.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220.000,0
06.AFA.002.051	Perencanaan draft/rancangan NSPK	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
06.AFA.002.052	Penyusunan draft/rancangan NSPK	Pendukung	70.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.000,0
06.AFA.002.053	Uji Petik draft/rancangan NSPK	Pendukung	70.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.000,0
06.AFA.002.054	Monitoring dan Evaluasi NSPK	Pendukung	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
Total			43.405.601,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43.405.601,0

Jakarta, 24 April 2025

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. PROGRAM : HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
3. SASARAN PROGRAM : 04 - Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan
4. KEGIATAN : 2353 - Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 01 - Dit. Pengendalian Operasi Armada
02 - Dit. Penanganan Pelanggaran
03 - Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan
04 - Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan
06 - Sekretariat Ditjen PSDKP

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan dan perikanan secara efektif		1.200.000,0
02.01	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan dan perikanan	80	
03	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif		5.968.500,0
03.01	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82	
03.02	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	82	
04	Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif		963.987,0
04.01	Intensitas konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	5	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
04.02	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	85	
Total			8.132.487,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02	<i>Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif</i>										1.200.000,0
02.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat										1.200.000,0
02.BDC.001	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan								000 - Bukan Tematik		300.000,0
	051 - Perencanaan kegiatan penyadartahuan masyarakat										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
	052 - Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan										150.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								150.000,0
	053 - evaluasi kegiatan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
02.BDC.002	Nelayan yang difasilitasi pemulangannya								000 - Bukan Tematik		300.000,0
	051 - Perencanaan Nelayan yang difasilitasi pemulangannya										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
	052 - Pelaksanaan Nelayan yang difasilitasi pemulangannya										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
	053 - Evaluasi Nelayan yang difasilitasi pemulangannya										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02.BDC.003	Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin								000 - Bukan Tematik		300.000,0
	051 - Perencanaan Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
	052 - Pelaksanaan Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
	053 - Evaluasi Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02.BDC.004	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan								000 - Bukan Tematik		300.000,0
	051 - Perencanaan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
	052 - Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
	053 - Monev dan pelaporan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
03	<i>Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif</i>										5.968.500,0
03.BKB	Pemantauan produk										350.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03.BKB.001	Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)								000 - Bukan Tematik		350.000,0
	051 - Perencanaan Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
	052 - PelaksanaanPemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)										250.000,0
		Pusat	Pusat								250.000,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
03.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat										5.618.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03.QDD.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)								003 - Anggaran Responsif Gender		5.618.500,0
	051 - Perencanaan pembinaan POKMASWAS										928.500,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								56.450,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								22.150,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								56.450,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								127.950,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								128.200,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								56.450,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								56.450,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								108.600,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								22.150,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								50.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								115.050,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								56.150,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								22.150,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								50.300,0
	052 - Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS										3.930.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								60.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								200.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								800.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								800.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								200.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								200.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								250.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								60.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								200.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								500.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								200.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								60.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								200.000,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS										760.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								50.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								20.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								50.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								100.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								100.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								50.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								50.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								50.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								20.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								50.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								100.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								50.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								20.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								50.000,0
04	<i>Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif</i>										963.987,0
04.BMB	Komunikasi Publik										963.987,0
04.BMB.001	Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan								000 - Bukan Tematik		963.987,0
	051 - Perencanaan Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										63.987,0
		Pusat	Pusat								63.987,0
	052 - Pelaksanaan Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										800.000,0
		Pusat	Pusat								800.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Evaluasi Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
Total											8.132.487,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan dan perikanan secara efektif				1.200.000,0				1.509.000,0	1.597.000,0	1.694.000,0
02.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		Orang		1.200.000,0				1.509.000,0	1.597.000,0	1.694.000,0
02.BDC.001	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	100	Orang		300.000,0	100	200	200	565.000,0	609.000,0	662.000,0
02.BDC.001.051	Perencanaan kegiatan penyadartahuan masyarakat	1,0	kegiatan	50.000,0	50.000,0	1,0	1,0	1,0	55.000,0	59.000,0	62.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.BDC.001.052	Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	300,0	orang	500,0	150.000,0	300,0	400,0	400,0	380.000,0	400.000,0	450.000,0
02.BDC.001.053	evaluasi kegiatan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	1,0	kegiatan	100.000,0	100.000,0	1,0	1,0	1,0	130.000,0	150.000,0	150.000,0
02.BDC.002	Nelayan yang difasilitasi pemulangnya	60	Orang		300.000,0	100	100	100	320.000,0	340.000,0	360.000,0
02.BDC.002.051	Perencanaan Nelayan yang difasilitasi pemulangnya	100,0	Orang	500,0	50.000,0	100,0	100,0	100,0	55.000,0	60.000,0	65.000,0
02.BDC.002.052	Pelaksanaan Nelayan yang difasilitasi pemulangnya	100,0	Orang	2.000,0	200.000,0	100,0	100,0	100,0	210.000,0	220.000,0	230.000,0
02.BDC.002.053	Evaluasi Nelayan yang difasilitasi pemulangnya	100,0	Orang	500,0	50.000,0	100,0	100,0	100,0	55.000,0	60.000,0	65.000,0
02.BDC.003	Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin	100	Orang		300.000,0	100	100	100	312.000,0	324.000,0	336.000,0
02.BDC.003.051	Perencanaan Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin	100,0	Orang	500,0	50.000,0	100,0	100,0	100,0	51.000,0	52.000,0	53.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.BDC.003.052	Pelaksanaan Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin	100,0	Orang	2.000,0	200.000,0	100,0	100,0	100,0	210.000,0	220.000,0	230.000,0
02.BDC.003.053	Evaluasi Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin	100,0	Orang	500,0	50.000,0	100,0	100,0	100,0	51.000,0	52.000,0	53.000,0
02.BDC.004	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	200	Orang		300.000,0	200	200	200	312.000,0	324.000,0	336.000,0
02.BDC.004.051	Perencanaan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	200,0	Orang	250,0	50.000,0	200,0	200,0	200,0	51.000,0	52.000,0	53.000,0
02.BDC.004.052	Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	200,0	Orang	1.000,0	200.000,0	200,0	200,0	200,0	210.000,0	220.000,0	230.000,0
02.BDC.004.053	Monev dan pelaporan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	200,0	Orang	250,0	50.000,0	200,0	200,0	200,0	51.000,0	52.000,0	53.000,0
03	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif				5.968.500,0				7.827.000,0	8.774.000,0	9.661.000,0
03.BKB	Pemantauan produk		Produk		350.000,0				362.000,0	374.000,0	386.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03.BKB.001	Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	34	laporan		350.000,0	34	34	34	362.000,0	374.000,0	386.000,0
03.BKB.001.051	Perencanaan Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1,0	Laporan	50.000,0	50.000,0	1,0	1,0	1,0	51.000,0	52.000,0	53.000,0
03.BKB.001.052	PelaksanaanPemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	34,0	Laporan	7.352,9	250.000,0	34,0	34,0	34,0	260.000,0	270.000,0	280.000,0
03.BKB.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	34,0	Laporan	1.470,6	50.000,0	34,0	34,0	34,0	51.000,0	52.000,0	53.000,0
03.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		Kelompok Masyarakat		5.618.500,0				7.465.000,0	8.400.000,0	9.275.000,0
03.QDD.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	55	Kelompok Masyarakat		5.618.500,0	1110	1110	1110	7.465.000,0	8.400.000,0	9.275.000,0
03.QDD.001.051	Perencanaan pembinaan POKMASWAS	0,0	Laporan	0,0	928.500,0	0,0	0,0	0,0	1.190.000,0	1.350.000,0	1.500.000,0
03.QDD.001.052	Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS	0,0	Kelompok Masyarakat	0,0	3.930.000,0	0,0	0,0	0,0	5.150.000,0	5.725.000,0	6.275.000,0
03.QDD.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS	0,0	Laporan	0,0	760.000,0	0,0	0,0	0,0	1.125.000,0	1.325.000,0	1.500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
04	Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif				963.987,0				0,0	0,0	0,0
04.BMB	Komunikasi Publik		layanan		963.987,0				0,0	0,0	0,0
04.BMB.001	Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	kegiatan		963.987,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
04.BMB.001.051	Perencanaan Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,0	Kegiatan	63.987,0	63.987,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04.BMB.001.052	Pelaksanaan Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,0	Kegiatan	800.000,0	800.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04.BMB.001.053	Evaluasi Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,0	Kegiatan	100.000,0	100.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					8.132.487,0	-	-	-	9.336.000,0	10.371.000,0	11.355.000,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif		1.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200.000,0
02.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		1.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.BDC.001	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan		300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
02.BDC.001.051	Perencanaan kegiatan penyadartahuan masyarakat	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
02.BDC.001.052	Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	Utama	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
02.BDC.001.053	evaluasi kegiatan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
02.BDC.002	Nelayan yang difasilitasi pemulangannya		300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
02.BDC.002.051	Perencanaan Nelayan yang difasilitasi pemulangannya	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
02.BDC.002.052	Pelaksanaan Nelayan yang difasilitasi pemulangannya	Pendukung	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
02.BDC.002.053	Evaluasi Nelayan yang difasilitasi pemulangannya	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
02.BDC.003	Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin		300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
02.BDC.003.051	Perencanaan Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
02.BDC.003.052	Pelaksanaan Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin	Pendukung	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.BDC.003.053	Evaluasi Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
02.BDC.004	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan		300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
02.BDC.004.051	Perencanaan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
02.BDC.004.052	Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	Pendukung	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
02.BDC.004.053	Monev dan pelaporan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
03	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif		5.968.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.968.500,0
03.BKB	Pemantauan produk		350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350.000,0
03.BKB.001	Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350.000,0
03.BKB.001.051	Perencanaan Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
03.BKB.001.052	PelaksanaanPemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pendukung	250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
03.BKB.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		5.618.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.618.500,0
03.QDD.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		5.618.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.618.500,0
03.QDD.001.051	Perencanaan pembinaan POKMASWAS	Utama	928.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	928.500,0
03.QDD.001.052	Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS	Utama	3.930.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.930.000,0
03.QDD.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS	Utama	760.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760.000,0
04	Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif		963.987,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	963.987,0
04.BMB	Komunikasi Publik		963.987,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	963.987,0
04.BMB.001	Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		963.987,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	963.987,0
04.BMB.001.051	Perencanaan Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pendukung	63.987,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63.987,0
04.BMB.001.052	Pelaksanaan Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pendukung	800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
04.BMB.001.053	Evaluasi Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
Total			8.132.487,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.132.487,0

Jakarta, 24 April 2025

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 03 - Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP
4. KEGIATAN : 2355 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 06 - Sekretariat Ditjen PSDKP

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		352.508.399,0
01.01	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PSDKP	87	
01.03	Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Anggaran	100	
01.04	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP	93,77	
01.05	Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA	100	
01.06	Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PSDKP	95	
01.07	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	85	
01.09	Nilai PMSAKIP Ditjen PSDKP	85	
01.11	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,35	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01.12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	100	
01.13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Ditjen PSDKP	95	
01.14	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	
01.15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Ditjen PSDKP	100	
01.16	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen PSDKP	88,5	
01.17	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,5	
01.18	Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP	100	
01.19	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	
01.20	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	
01.21	Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP	100	
01.22	Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK	16	
01.23	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	75	
01.24	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Ditjen. PSDKP	75	
01.25	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP	78	
01.26	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen. PSDKP	83	
01.27	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	1	
01.28	Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen. PSDKP	100	
01.29	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	
01.30	Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP	60	
01.31	Indeks Efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP	80	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01.32	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	95	
01.33	Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PSDKP	82,5	
01.35	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	76	
Total			352.508.399,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>										352.508.399,0
01.AEC	Kerja sama										3.200.000,0
01.AEC.001	Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan								000 - Bukan Tematik		3.200.000,0
	051 - Perencanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										260.000,0
		Pusat	Pusat								260.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										2.690.000,0
		Pusat	Pusat								2.690.000,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										250.000,0
		Pusat	Pusat								250.000,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										2.285.000,0
01.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi								000 - Bukan Tematik		2.285.000,0
	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi										2.285.000,0
		Pusat	Pusat								335.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								100.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								150.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								150.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								150.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								150.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								150.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								150.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								100.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								150.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								150.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								100.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								150.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								150.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								150.000,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										301.383.399,0
01.EBA.956	Layanan BMN								000 - Bukan Tematik		1.300.000,0
	051 - Perencanaan Pengelolaan BMN										104.000,0
		Pusat	Pusat								104.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pelaksanaan Pengelolaan BMN										1.076.000,0
		Pusat	Pusat								449.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								58.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								25.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								35.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								23.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								30.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								30.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								48.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								32.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								35.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								52.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								45.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								72.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								82.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								60.000,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan BMN										120.000,0
		Pusat	Pusat								120.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.957	Layanan Hukum								000 - Bukan Tematik		1.000.000,0
	051 - Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan										800.000,0
		Pusat	Pusat								800.000,0
	053 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi								000 - Bukan Tematik		1.832.000,0
	051 - Perencanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat										137.200,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								3.100,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								3.100,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								3.100,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								3.100,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								3.100,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								3.100,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								3.100,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								3.100,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								3.100,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								3.100,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								3.100,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								3.100,0
	052 - Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat										1.574.800,0
		Pusat	Pusat								944.874,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								37.326,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								43.500,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								49.500,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								43.500,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								52.600,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								43.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								43.500,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								49.500,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								43.500,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								43.500,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								43.500,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								49.500,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								43.500,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								43.500,0
	054 - Evaluasi Publikasi dan Hubungan Masyarakat										120.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								120.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal								000 - Bukan Tematik		1.100.000,0
	051 - Perencanaan Layanan Organisasi dan Tata Kelola										150.000,0
		Pusat	Pusat								150.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Penataan Organisasi dan Tata Kelola										833.000,0
		Pusat	Pusat								396.300,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								13.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								12.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								12.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								36.500,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								12.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								75.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								12.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								55.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								16.200,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								58.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								27.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								18.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								38.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								52.000,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Layanan Organisasi dan Tata Kelola										117.000,0
		Pusat	Pusat								117.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.962	Layanan Umum								000 - Bukan Tematik		14.599.230,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Layanan umum rumah tangga										2.404.230,0
		Pusat	Pusat								2.404.230,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan										8.995.000,0
		Pusat	Pusat								487.658,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								29.572,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								560.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								29.572,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								500.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								29.572,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								29.572,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								29.572,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								33.480,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								29.572,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								29.572,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								29.572,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								33.912,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								420.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								27.532,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								500.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								36.152,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								29.572,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								320.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								35.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								29.572,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								29.572,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								29.572,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								575.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								34.342,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								29.572,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								575.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								29.572,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								420.000,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								32.692,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								30.560,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								29.572,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara								29.572,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								520.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								29.572,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								520.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								590.000,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								29.572,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								29.572,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								28.812,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								29.572,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								30.132,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								29.572,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								575.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								800.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								29.572,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								29.572,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								29.572,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								600.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	054 - Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan										2.700.000,0
		Pusat	Pusat								2.700.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi								000 - Bukan Tematik		1.500.000,0
	051 - Perencanaan Pengelolaan data dan informasi										75.000,0
		Pusat	Pusat								75.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pengelolaan Data Pengawasan SDKP										1.005.000,0
		Pusat	Pusat								433.500,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								60.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								27.500,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								35.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								35.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								35.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								40.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								40.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								40.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								30.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								42.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								45.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								40.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								46.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								56.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Satu Data KKP Bidang Pengawasan SDKP										320.000,0
		Pusat	Pusat								320.000,0
	054 - Evaluasi/Pelaporan pengelolaan data dan informasi										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum								000 - Bukan Tematik		42.976,0
	051 - Persiapan Bantuan Hukum										5.000,0
		Pusat	Pusat								5.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Bantuan Hukum										32.976,0
		Pusat	Pusat								32.976,0
	053 - Evaluasi/Pelaporan Bantuan Hukum										5.000,0
		Pusat	Pusat								5.000,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran								000 - Bukan Tematik		280.009.193,0
	001 - Gaji dan Tunjangan										198.009.193,0
		Pusat	Pusat								54.489.169,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								9.435.863,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								11.393.480,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								13.510.311,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								15.210.387,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								11.493.279,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								10.887.427,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								7.357.355,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								12.062.553,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								6.394.159,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								4.417.712,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								15.173.321,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								7.172.089,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								11.894.652,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								7.117.436,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										82.000.000,0
		Pusat	Pusat								17.210.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								4.200.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								3.600.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								7.200.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								6.750.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								4.600.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								4.550.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								2.900.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								5.600.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								3.550.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								2.450.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								6.000.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								3.100.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								6.540.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								3.750.000,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										6.900.000,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal								000 - Bukan Tematik		5.400.000,0
	051 - Pengadaan kendaraan bermotor										2.070.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								1.700.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								120.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								100.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								150.000,0
	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran										2.830.000,0
		Pusat	Pusat								1.570.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								100.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								145.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								100.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								130.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								100.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								100.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								125.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								110.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								100.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								100.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								150.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	054 - Penataan Ruangan										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal								000 - Bukan Tematik		1.500.000,0
	051 - Pengadaan prasarana perkantoran										1.500.000,0
		Pusat	Pusat								1.500.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal										15.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM								000 - Bukan Tematik		5.000.000,0
	051 - Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai										1.453.000,0
		Pusat	Pusat								1.428.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								25.000,0
	052 - Pengelolaan Administrasi dan Mutasi Pegawai										412.000,0
		Pusat	Pusat								370.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								42.000,0
	053 - Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional										3.135.000,0
		Pusat	Pusat								778.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								180.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								65.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								160.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								160.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								150.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								160.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								185.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								202.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								270.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								160.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								165.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								180.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								160.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								160.000,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan								003 - Anggaran Responsif Gender		10.000.000,0
	051 - Perencanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP										150.000,0
		Pusat	Pusat								150.000,0
	052 - Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP										9.700.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								9.700.000,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Diklat Internal lingkup Ditjen. PSDKP										150.000,0
		Pusat	Pusat								150.000,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										23.740.000,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran								003 - Anggaran Responsif Gender		6.480.000,0
	051 - Perencanaan Penyusunan Dokumen rencana dan anggaran										195.200,0
		Pusat	Pusat								195.200,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	052 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran										4.384.000,0
		Pusat	Pusat								3.243.500,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								25.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								30.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								75.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								75.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								60.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								110.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								85.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								120.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								165.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								60.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								80.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								115.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								65.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								75.500,0
	053 - Fasilitas Revisi Anggaran										220.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								220.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	054 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Umum										1.470.800,0
		Pusat	Pusat								1.470.800,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	055 - Evaluasi dan Pelaporan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran										210.000,0
		Pusat	Pusat								210.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								000 - Bukan Tematik		3.840.000,0
	051 - Perencanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan										3.640.000,0
		Pusat	Pusat								2.377.250,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								62.750,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								100.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								85.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								80.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								115.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								50.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								100.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								95.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								100.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								105.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								100.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								145.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								125.000,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan								000 - Bukan Tematik		6.462.000,0
	051 - Perencanaan Pengelolaan Keuangan										55.000,0
		Pusat	Pusat								55.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	052 - Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan										5.913.900,0
		Pusat	Pusat								5.019.400,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								50.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								35.500,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								65.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								49.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								45.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								85.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								57.500,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								75.500,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								92.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								50.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								65.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								100.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								50.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								75.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Pengelolaan Keuangan										493.100,0
		Pusat	Pusat								493.100,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja								000 - Bukan Tematik		5.388.000,0
	051 - Perencanaan Reformasi Kinerja										32.000,0
		Pusat	Pusat								32.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP										2.296.000,0
		Pusat	Pusat								1.997.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								40.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								20.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								20.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								15.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								15.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								15.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								50.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								15.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								24.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								20.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								20.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								20.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								25.000,0
	053 - Pengelolaan Kinerja Pegawai										160.000,0
		Pusat	Pusat								160.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
	054 - Fasilitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi										2.600.000,0
		Pusat	Pusat								720.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								125.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								150.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								200.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								85.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								130.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								85.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								100.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								175.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								85.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								165.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								130.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								250.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								200.000,0
	055 - Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Kinerja										300.000,0
		Pusat	Pusat								300.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan								000 - Bukan Tematik		1.570.000,0
	051 - Perencanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
	052 - Pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP										1.370.000,0
		Pusat	Pusat								1.370.000,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
Total											352.508.399,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				352.508.399,0				351.193.754,0	0,0	0,0
01.AEC	Kerja sama		Kesepakatan		3.200.000,0				3.190.000,0	0,0	0,0
01.AEC.001	Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4	Dokumen		3.200.000,0	4	4	4	3.190.000,0	0,0	0,0
01.AEC.001.051	Perencanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0,0	kegiatan	0,0	260.000,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0	0,0	0,0
01.AEC.001.052	Pelaksanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0,0	kegiatan	0,0	2.690.000,0	0,0	0,0	0,0	2.690.000,0	0,0	0,0
01.AEC.001.053	Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0,0	kegiatan	0,0	250.000,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0	0,0	0,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		2.285.000,0				2.780.000,0	0,0	0,0
01.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	169	Unit		2.285.000,0	169	0	0	2.780.000,0	0,0	0,0
01.CAN.001.051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0,0	unit	0,0	2.285.000,0	0,0	0,0	0,0	2.780.000,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		301.383.399,0				310.006.804,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBA.956	Layanan BMN	9	Layanan		1.300.000,0	9	9	9	0,0	0,0	0,0
01.EBA.956.051	Perencanaan Pengelolaan BMN	0,0	layanan	0,0	104.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.956.052	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	0,0	Layanan	0,0	1.076.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.956.053	Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan BMN	0,0	layanan	0,0	120.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan		1.000.000,0	1	1	1	1.100.000,0	0,0	0,0
01.EBA.957.051	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	0,0	Layanan	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0
01.EBA.957.052	Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	0,0	Layanan	0,0	800.000,0	0,0	0,0	0,0	900.000,0	0,0	0,0
01.EBA.957.053	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,0	kegiatan	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	4	Layanan		1.832.000,0	4	4	4	2.899.326,0	0,0	0,0
01.EBA.958.051	Perencanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat	0,0	dokumen	0,0	137.200,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0	0,0	0,0
01.EBA.958.052	Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat	0,0	dokumen	0,0	1.574.800,0	0,0	0,0	0,0	2.649.326,0	0,0	0,0
01.EBA.958.054	Evaluasi Publikasi dan Hubungan Masyarakat	0,0	dokumen	0,0	120.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan		1.100.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBA.960.051	Perencanaan Layanan Organisasi dan Tata Kelola	0,0	Layanan	0,0	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.052	Penataan Organisasi dan Tata Kelola	0,0	Layanan	0,0	833.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.053	Evaluasi dan Pelaporan Layanan Organisasi dan Tata Kelola	0,0	layanan	0,0	117.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan		14.599.230,0	1	1	1	12.687.000,0	0,0	0,0
01.EBA.962.051	Layanan umum rumah tangga	0,0	Layanan	0,0	2.404.230,0	0,0	0,0	0,0	1.400.000,0	0,0	0,0
01.EBA.962.052	Pengelolaan arsip dan persuratan	0,0	Layanan	0,0	8.995.000,0	0,0	0,0	0,0	8.887.000,0	0,0	0,0
01.EBA.962.053	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	0,0	Layanan	0,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0	0,0	0,0
01.EBA.962.054	Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan	0,0	Layanan	0,0	2.700.000,0	0,0	0,0	0,0	1.800.000,0	0,0	0,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan		1.500.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.963.051	Perencanaan Pengelolaan data dan informasi	0,0	layanan	0,0	75.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.963.052	Pengelolaan Data Pengawasan SDKP	0,0	Layanan	0,0	1.005.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.963.053	Satu Data KKP Bidang Pengawasan SDKP	0,0	Layanan	0,0	320.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.963.054	Evaluasi/Pelaporan pengelolaan data dan informasi	0,0	layanan	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	2	Layanan		42.976,0	2	2	2	400.832,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBA.969.051	Persiapan Bantuan Hukum	0,0	layanan	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0	0,0
01.EBA.969.052	Pelaksanaan Bantuan Hukum	0,0	layanan	0,0	32.976,0	0,0	0,0	0,0	300.832,0	0,0	0,0
01.EBA.969.053	Evaluasi/Pelaporan Bantuan Hukum	0,0	layanan	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0	0,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		280.009.193,0	1	1	1	292.919.646,0	0,0	0,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	0,0	layanan	0,0	198.009.193,0	0,0	0,0	0,0	200.819.646,0	0,0	0,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0,0	layanan	0,0	82.000.000,0	0,0	0,0	0,0	92.100.000,0	0,0	0,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ m2/ Paket		6.900.000,0				7.079.000,0	0,0	0,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	442	Unit		5.400.000,0	448	68	68	5.489.000,0	0,0	0,0
01.EBB.951.051	Pengadaan kendaraan bermotor	0,0	unit	0,0	2.070.000,0	0,0	0,0	0,0	2.120.000,0	0,0	0,0
01.EBB.951.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0,0	unit	0,0	2.830.000,0	0,0	0,0	0,0	2.869.000,0	0,0	0,0
01.EBB.951.054	Penataan Ruangan	0,0	unit	0,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0	0,0	0,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	57	Unit		1.500.000,0	60	60	60	1.590.000,0	0,0	0,0
01.EBB.971.051	Pengadaan prasarana perkantoran	0,0	unit	0,0	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	1.590.000,0	0,0	0,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang/ Layanan/ Rekomendasi		15.000.000,0				11.885.000,0	0,0	0,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1537	Orang		5.000.000,0	1537	1537	1537	2.525.000,0	0,0	0,0
01.EBC.954.051	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai	0,0	orang	0,0	1.453.000,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBC.954.052	Pengelolaan Administrasi dan Mutasi Pegawai	0,0	orang	0,0	412.000,0	0,0	0,0	0,0	350.000,0	0,0	0,0
01.EBC.954.053	Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional	2.156,0	Orang	1.454,1	3.135.000,0	0,0	0,0	0,0	675.000,0	0,0	0,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	291	Orang		10.000.000,0	291	291	291	9.360.000,0	0,0	0,0
01.EBC.996.051	Perencanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	orang	0,0	150.000,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0	0,0	0,0
01.EBC.996.052	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	orang	0,0	9.700.000,0	0,0	0,0	0,0	9.060.000,0	0,0	0,0
01.EBC.996.053	Evaluasi dan Pelaporan Diklat Internal lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	orang	0,0	150.000,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0	0,0	0,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		23.740.000,0				16.252.950,0	0,0	0,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	8	Dokumen		6.480.000,0	8	8	8	4.599.200,0	0,0	0,0
01.EBD.952.051	Perencanaan Penyusunan Dokumen rencana dan anggaran	0,0	dokumen	0,0	195.200,0	0,0	0,0	0,0	198.400,0	0,0	0,0
01.EBD.952.052	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	15,0	dokumen	292.266,7	4.384.000,0	0,0	0,0	0,0	2.500.000,0	0,0	0,0
01.EBD.952.053	Fasilitasi Revisi Anggaran	0,0	dokumen	0,0	220.000,0	0,0	0,0	0,0	220.000,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBD.952.054	Penyusunan Dokumen Perencanaan Umum	0,0	dokumen	0,0	1.470.800,0	0,0	0,0	0,0	1.470.800,0	0,0	0,0
01.EBD.952.055	Evaluasi dan Pelaporan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	0,0	dokumen	0,0	210.000,0	0,0	0,0	0,0	210.000,0	0,0	0,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	16	Dokumen		3.840.000,0	16	16	16	1.411.750,0	0,0	0,0
01.EBD.953.051	Perencanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	0,0	laporan	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	0,0	0,0
01.EBD.953.052	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	0,0	laporan	0,0	3.640.000,0	0,0	0,0	0,0	1.011.750,0	0,0	0,0
01.EBD.953.053	Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	0,0	laporan	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	0,0	0,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan		6.462.000,0	1	1	1	5.460.000,0	0,0	0,0
01.EBD.955.051	Perencanaan Pengelolaan Keuangan	0,0	dokumen	0,0	55.000,0	0,0	0,0	0,0	65.000,0	0,0	0,0
01.EBD.955.052	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	14,0	Laporan	422.421,4	5.913.900,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0	0,0	0,0
01.EBD.955.053	Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Pengelolaan Keuangan	1,0	Laporan	493.100,0	493.100,0	0,0	0,0	0,0	395.000,0	0,0	0,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1	Layanan		5.388.000,0	1	1	1	3.212.000,0	0,0	0,0
01.EBD.961.051	Perencanaan Reformasi Kinerja	0,0	laporan	0,0	32.000,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBD.961.052	Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP	0,0	dokumen	0,0	2.296.000,0	0,0	0,0	0,0	1.997.000,0	0,0	0,0
01.EBD.961.053	Pengelolaan Kinerja Pegawai	0,0	dokumen	0,0	160.000,0	0,0	0,0	0,0	160.000,0	0,0	0,0
01.EBD.961.054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0,0	dokumen	0,0	2.600.000,0	0,0	0,0	0,0	720.000,0	0,0	0,0
01.EBD.961.055	Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Kinerja	0,0	laporan	0,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0	0,0	0,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen		1.570.000,0	1	0.001	1	1.570.000,0	0,0	0,0
01.EBD.974.051	Perencanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	kegiatan	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0
01.EBD.974.052	Pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	kegiatan	0,0	1.370.000,0	0,0	0,0	0,0	1.370.000,0	0,0	0,0
01.EBD.974.053	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	kegiatan	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0
Total					352.508.399,0	-	-	-	351.193.754,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		352.508.399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352.508.399,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.AEC	Kerja sama		3.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200.000,0
01.AEC.001	Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		3.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200.000,0
01.AEC.001.051	Perencanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pendukung	260.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260.000,0
01.AEC.001.052	Pelaksanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Utama	2.690.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.690.000,0
01.AEC.001.053	Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pendukung	250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		2.285.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.285.000,0
01.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		2.285.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.285.000,0
01.CAN.001.051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Pendukung	2.285.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.285.000,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		301.383.399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301.383.399,0
01.EBA.956	Layanan BMN		1.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300.000,0
01.EBA.956.051	Perencanaan Pengelolaan BMN	Pendukung	104.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104.000,0
01.EBA.956.052	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Pendukung	1.076.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.076.000,0
01.EBA.956.053	Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan BMN	Pendukung	120.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120.000,0
01.EBA.957	Layanan Hukum		1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBA.957.051	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.EBA.957.052	Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	Pendukung	800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
01.EBA.957.053	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1.832.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.832.000,0
01.EBA.958.051	Perencanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat	Pendukung	137.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137.200,0
01.EBA.958.052	Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat	Pendukung	1.574.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.574.800,0
01.EBA.958.054	Evaluasi Publikasi dan Hubungan Masyarakat	Pendukung	120.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120.000,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100.000,0
01.EBA.960.051	Perencanaan Layanan Organisasi dan Tata Kelola	Pendukung	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.EBA.960.052	Penataan Organisasi dan Tata Kelola	Pendukung	833.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	833.000,0
01.EBA.960.053	Evaluasi dan Pelaporan Layanan Organisasi dan Tata Kelola	Pendukung	117.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117.000,0
01.EBA.962	Layanan Umum		14.599.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.599.230,0
01.EBA.962.051	Layanan umum rumah tangga	Pendukung	2.404.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.404.230,0
01.EBA.962.052	Pengelolaan arsip dan persuratan	Pendukung	8.995.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.995.000,0
01.EBA.962.053	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pendukung	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBA.962.054	Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan	Pendukung	2.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700.000,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
01.EBA.963.051	Perencanaan Pengelolaan data dan informasi	Pendukung	75.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.000,0
01.EBA.963.052	Pengelolaan Data Pengawasan SDKP	Pendukung	1.005.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.005.000,0
01.EBA.963.053	Satu Data KKP Bidang Pengawasan SDKP	Pendukung	320.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320.000,0
01.EBA.963.054	Evaluasi/Pelaporan pengelolaan data dan informasi	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		42.976,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.976,0
01.EBA.969.051	Persiapan Bantuan Hukum	Pendukung	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
01.EBA.969.052	Pelaksanaan Bantuan Hukum	Pendukung	32.976,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.976,0
01.EBA.969.053	Evaluasi/Pelaporan Bantuan Hukum	Pendukung	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		280.009.193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280.009.193,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Pendukung	198.009.193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198.009.193,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pendukung	82.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82.000.000,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		6.900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.900.000,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal		5.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.400.000,0
01.EBB.951.051	Pengadaan kendaraan bermotor	Pendukung	2.070.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.070.000,0
01.EBB.951.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Pendukung	2.830.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.830.000,0
01.EBB.951.054	Penataan Ruangan	Pendukung	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBB.971.051	Pengadaan prasarana perkantoran	Pendukung	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		15.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000.000,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0
01.EBC.954.051	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai	Pendukung	1.453.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.453.000,0
01.EBC.954.052	Pengelolaan Administrasi dan Mutasi Pegawai	Pendukung	412.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412.000,0
01.EBC.954.053	Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional	Pendukung	3.135.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.135.000,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		10.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000.000,0
01.EBC.996.051	Perencanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP	Pendukung	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.EBC.996.052	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP	Pendukung	9.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.700.000,0
01.EBC.996.053	Evaluasi dan Pelaporan Diklat Internal lingkup Ditjen. PSDKP	Pendukung	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		23.740.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.740.000,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		6.480.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.480.000,0
01.EBD.952.051	Perencanaan Penyusunan Dokumen rencana dan anggaran	Pendukung	195.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195.200,0
01.EBD.952.052	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	Pendukung	4.384.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.384.000,0
01.EBD.952.053	Fasilitasi Revisi Anggaran	Pendukung	220.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBD.952.054	Penyusunan Dokumen Perencanaan Umum	Pendukung	1.470.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.470.800,0
01.EBD.952.055	Evaluasi dan Pelaporan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Pendukung	210.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210.000,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		3.840.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.840.000,0
01.EBD.953.051	Perencanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.EBD.953.052	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	Pendukung	3.640.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.640.000,0
01.EBD.953.053	Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		6.462.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.462.000,0
01.EBD.955.051	Perencanaan Pengelolaan Keuangan	Pendukung	55.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55.000,0
01.EBD.955.052	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Pendukung	5.913.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.913.900,0
01.EBD.955.053	Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Pengelolaan Keuangan	Pendukung	493.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493.100,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		5.388.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.388.000,0
01.EBD.961.051	Perencanaan Reformasi Kinerja	Pendukung	32.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.000,0
01.EBD.961.052	Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP	Pendukung	2.296.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.296.000,0
01.EBD.961.053	Pengelolaan Kinerja Pegawai	Pendukung	160.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160.000,0
01.EBD.961.054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pendukung	2.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.600.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBD.961.055	Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Kinerja	Pendukung	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1.570.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.570.000,0
01.EBD.974.051	Perencanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.EBD.974.052	Pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	Utama	1.370.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.370.000,0
01.EBD.974.053	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
Total			352.508.399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352.508.399,0

Jakarta, 24 April 2025

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
04	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan		77.127.035,0
04.02	Persentase prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	100	
04.03	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	100	
04.04	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP	82	
04.05	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP	100	
Total			442.334.722,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PSDKP										520.000
02.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan										300.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan								000 - Bukan Tematik		300.000
	051 - Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada serta Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										50.000
		Pusat	Pusat								50.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada serta Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										200.000
		Pusat	Pusat								200.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada serta Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										50.000
		Pusat	Pusat								50.000
02.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										220.000
02.AFA.001	NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP								000 - Bukan Tematik		220.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Persiapan Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP										50.000
		Pusat	Pusat								50.000
	052 - Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP										120.000
		Pusat	Pusat								120.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP										50.000
		Pusat	Pusat								50.000
03	<i>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif</i>										364.687.687
03.BKB	Pemantauan produk										1.300.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03.BKB.001	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipantau								000 - Bukan Tematik		1.300.000
	051 - Perencanaan Supervisi Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan										107.445
		Pusat	Pusat								107.445

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan BIMTEK Pemantauan, Operasi Armada dan Pembangunan Infrastruktur										0
		Pusat	Pusat								0
	053 - Pelaksanaan Supervisi Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan										389.190
		Pusat	Pusat								389.190

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	054 - Monitoring, Evaluasi Supervisi Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan										803.365
		Pusat	Pusat								803.365
03.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah										592.000
03.FBA.001	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada								000 - Bukan Tematik		592.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pemantauan dan Operasi Armada										100.000
		Pusat	Pusat								100.000
	052 - Pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pemantauan dan Operasi Armada										392.000
		Pusat	Pusat								392.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Monitoring Evaluasi Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pemantauan dan Operasi Armada										100.000
		Pusat	Pusat								100.000
03.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam										362.795.687

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi	Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan Choke Point	Patroli, Operasi, dan Kolaborasi Instansi Keamanan Laut	000 - Bukan Tematik		309.385.487
	051 - Perencanaan Operasi Kapal Pengawas										144.140
		Pusat	Pusat								144.140
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0
	051 - Perencanaan Operasi Kapal Pengawas										0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0
	052 - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas										180.194.138
		Pusat	Pusat								110.640.127
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								3.360.837

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								6.524.286
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								12.294.822
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								5.183.394
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								1.645.754
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								3.149.246
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								4.264.576
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								7.987.282
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								2.348.800

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								3.360.842
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								3.919.898
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								3.353.907
		Provinsi Maluku	Kota Tual								8.656.781
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								3.503.586
	052 - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas										128.474.869
		Pusat	Pusat								78.889.497
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								2.471.821
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								5.751.678

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								8.019.588
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								3.393.949
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								536.481
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								1.737.248
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								3.571.562
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								6.189.708
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								1.722.017
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								2.471.816

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								1.072.963
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								2.471.816
		Provinsi Maluku	Kota Tual								6.603.163
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								3.571.562
	053 - Monitoring dan Evaluasi Operasi Kapal Pengawas										572.340
		Pusat	Pusat								572.340
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0
03.QHD.002	Operasi Pesawat Patroli				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi	Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan Choke Point	Patroli, Operasi, dan Kolaborasi Instansi Keamanan Laut	000 - Bukan Tematik		43.000.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan Operasi Pengawasan SDKP Melalui Udara										20.040
		Pusat	Pusat								20.040
	052 - Operasional Pengawasan SDKP Melalui Udara										42.970.720
		Pusat	Pusat								42.970.720
	053 - Monitoring dan Evaluasi Operasi Pengawasan SDKP Melalui Udara										9.240
		Pusat	Pusat								9.240

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi	Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan Choke Point	Patroli, Operasi, dan Kolaborasi Instansi Keamanan Laut	000 - Bukan Tematik		10.410.200
	051 - Perencanaan Operasi Speedboat Pengawas										119.000
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								8.500

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								8.500
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								8.500
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								8.500
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								8.500
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								8.500
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								8.500
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								8.500
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								8.500

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								8.500
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								8.500
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								8.500
		Provinsi Maluku	Kota Tual								8.500
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								8.500
	052 - Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas										10.172.200
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								605.140
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								250.678
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								1.352.516

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								759.051
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								815.140
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								702.086
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								197.580
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								691.600
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								610.760
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								350.504
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								1.501.817

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								627.946
		Provinsi Maluku	Kota Tual								1.463.682
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								243.700
	053 - Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas										119.000
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								8.500
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								8.500
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								8.500
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								8.500

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								8.500
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								8.500
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								8.500
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								8.500
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								8.500
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								8.500
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								8.500
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								8.500
		Provinsi Maluku	Kota Tual								8.500

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								8.500
03.QHD.004	Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi	Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan Choke Point	Patroli, Operasi, dan Kolaborasi Instansi Keamanan Laut	000 - Bukan Tematik		0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster										0
		Pusat	Pusat								0
	052 - Pelaksanaan Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster										0
		Pusat	Pusat								0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster										0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								0
04	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan</i>										77.127.035
04.CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan										1.000.000
04.CAL.001	Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan								000 - Bukan Tematik		1.000.000
	051 - Pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan sumber daya kelautan										1.000.000
		Pusat	Pusat								1.000.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04.CBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan										0
04.CBQ.001	Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun								000 - Bukan Tematik		0
	051 - Perencanaan Pembangunan Prasarana Pendukung Pengawasan SDKP										0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pembangunan Prasarana Pendukung Pengawasan SDKP										0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Pendukung Pengawasan SDKP										0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0
04.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan										0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04.RAL.001	Kapal Pengawas				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi	Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut	000 - Bukan Tematik		0
	051 - Perencanaan Pengadaan Kapal Pengawas										0
		Pusat	Pusat								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan										0
		Pusat	Pusat								0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan										0
		Pusat	Pusat								0
	055 - Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan (ABT)										0
		Pusat	Pusat								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04.RAL.002	Speedboat Pengawas				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi	Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut	000 - Bukan Tematik		0
	051 - Perencanaan Pengadaan Speedboat Pengawas										0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0
	052 - Pengadaan Speedboat Pengawas Perikanan										0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Speedboat Pengawas										0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan										9.500.000
04.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi	Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut	000 - Bukan Tematik		9.500.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP										543.790
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								182.000
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								13.000
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								39.000
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								78.000
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								83.200

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								26.390
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								61.100
		Provinsi Maluku	Kota Tual								61.100
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP										7.399.260
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								900.000
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								1.500.000
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								928.760
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								1.000.000
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								1.000.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								1.000.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								70.500
		Provinsi Maluku	Kota Tual								1.000.000
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP										1.556.950

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								210.000
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								15.000
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								45.000
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								90.000
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								96.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								30.450
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								1.000.000
		Provinsi Maluku	Kota Tual								70.500
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0
	057 - Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (ABT)										0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0
04.RCG	OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup										66.627.035

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04.RCG.001	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi	Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut	000 - Bukan Tematik		66.627.035
	051 - Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas										797.460
		Pusat	Pusat								787.200

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								700
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								650
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								660
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								750
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								710
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								680
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								640
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								600

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								730
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								800
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								800
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								810
		Provinsi Maluku	Kota Tual								810
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								920
	052 - Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas										65.188.235
		Pusat	Pusat								41.794.085
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								1.287.560

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								2.162.030
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								2.913.680
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								1.669.550
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								1.650.620
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								1.310.340
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								1.202.640
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								1.955.160
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								1.626.760

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								1.126.060
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								1.817.020
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								1.339.920
		Provinsi Maluku	Kota Tual								2.240.570
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								1.092.240
	053 - Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas										641.340
		Pusat	Pusat								631.080
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								700
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								650

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								660
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								750
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								710
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								680
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								640
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								600
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								730
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								800

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RI RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								800
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								810
		Provinsi Maluku	Kota Tual								810
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								920
Total											442.334.722

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PSDKP				520.000,0				1.500.000,0	1.500.000,0	1.540.000,0
02.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		Rekomendasi Kebijakan		300.000,0				1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi Kebijakan		300.000,0	1	1	1	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
02.ABW.001.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada serta Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	50.000,0	50.000,0	1,0	1,0	1,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
02.ABW.001.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada serta Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	200.000,0	200.000,0	1,0	1,0	1,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.ABW.001.053	Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada serta Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	50.000,0	50.000,0	1,0	1,0	1,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
02.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK		220.000,0				500.000,0	500.000,0	540.000,0
02.AFA.001	NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	1	NSPK		220.000,0	1	1	1	500.000,0	500.000,0	540.000,0
02.AFA.001.051	Persiapan Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	4,0	Laporan	12.500,0	50.000,0	4,0	4,0	0,0	50.000,0	50.000,0	60.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.AFA.001.052	Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	4,0	NSPK	30.000,0	120.000,0	4,0	4,0	0,0	350.000,0	350.000,0	360.000,0
02.AFA.001.053	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	4,0	Laporan	12.500,0	50.000,0	4,0	4,0	0,0	100.000,0	100.000,0	120.000,0
03	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif				364.687.687,0				488.008.893,0	488.008.892,0	561.831.973,0
03.BKB	Pemantauan produk		Produk		1.300.000,0				1.000.000,0	1.000.000,0	1.050.000,0
03.BKB.001	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipantau	4	laporan		1.300.000,0	4	4	4	1.000.000,0	1.000.000,0	1.050.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03.BKB.001.051	Perencanaan Supervisi Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1,0	Laporan	107.445,0	107.445,0	1,0	1,0	0,0	230.310,0	230.310,0	250.000,0
03.BKB.001.052	Pelaksanaan BIMTEK Pemantauan, Operasi Armada dan Pembangunan Infrastruktur	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BKB.001.053	Pelaksanaan Supervisi Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1,0	Laporan	389.190,0	389.190,0	1,0	1,0	0,0	345.690,0	345.690,0	350.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03.BKB.001.054	Monitoring, Evaluasi Supervisi Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1,0	Laporan	803.365,0	803.365,0	1,0	1,0	0,0	424.000,0	424.000,0	450.000,0
03.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Provinsi/ Kab/Kota		592.000,0				1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
03.FBA.001	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada	25	Daerah (Prov/Kab/Kota)		592.000,0	37	37	37	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
03.FBA.001.051	Perencanaan Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pemantauan dan Operasi Armada	1,0	Pemerintah Daerah	100.000,0	100.000,0	1,0	1,0	1,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03.FBA.001.052	Pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pemantauan dan Operasi Armada	1,0	Pemerintah Daerah	392.000,0	392.000,0	1,0	1,0	1,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0
03.FBA.001.053	Monitoring Evaluasi Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pemantauan dan Operasi Armada	1,0	Pemerintah Daerah	100.000,0	100.000,0	1,0	1,0	1,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
03.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		Operasi		362.795.687,0				486.008.893,0	486.008.892,0	559.781.973,0
03.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	28	Operasi		309.385.487,0	180	180	0	420.308.893,0	420.308.892,0	529.781.973,0
03.QHD.001.051	Perencanaan Operasi Kapal Pengawas	14,0	Laporan	10.295,7	144.140,0	14,0	14,0	6,0	215.762,0	215.762,0	191.660,0
03.QHD.001.051	Perencanaan Operasi Kapal Pengawas	1,0	Laporan	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	26.244,0	26.244,0	0,0
03.QHD.001.052	Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas	15,0	Laporan	12.012.942,5	180.194.138,0	15,0	15,0	6,0	416.587.576,0	416.587.575,0	526.184.352,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03.QHD.001.052	Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas	0,0	Laporan	0,0	128.474.869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.QHD.001.053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Kapal Pengawas	15,0	Laporan	38.156,0	572.340,0	15,0	15,0	6,0	3.479.311,0	3.479.311,0	3.405.961,0
03.QHD.002	Operasi Pesawat Patroli	140	Operasi		43.000.000,0	170	170	0	50.000.000,0	50.000.000,0	0,0
03.QHD.002.051	Perencanaan Operasi Pengawasan SDKP Melalui Udara	1,0	Laporan	20.040,0	20.040,0	1,0	1,0	0,0	19.800,0	19.800,0	0,0
03.QHD.002.052	Operasional Pengawasan SDKP Melalui Udara	12,0	Laporan	3.580.893,3	42.970.720,0	12,0	12,0	0,0	49.971.200,0	49.971.200,0	0,0
03.QHD.002.053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Pengawasan SDKP Melalui Udara	1,0	Laporan	9.240,0	9.240,0	1,0	1,0	0,0	9.000,0	9.000,0	0,0
03.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas	20	Operasi		10.410.200,0	50	50	50	15.700.000,0	15.700.000,0	30.000.000,0
03.QHD.003.051	Perencanaan Operasi Speedboat Pengawas	14,0	laporan	8.500,0	119.000,0	14,0	14,0	13,0	119.000,0	119.000,0	119.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03.QHD.003.052	Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas	14,0	Hari Operasi	726.585,7	10.172.200,0	14,0	14,0	13,0	15.462.000,0	15.462.000,0	29.762.000,0
03.QHD.003.053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas	14,0	Hari Operasi	8.500,0	119.000,0	14,0	14,0	13,0	119.000,0	119.000,0	119.000,0
03.QHD.004	Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster	0	Operasi		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
03.QHD.004.051	Perencanaan Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster	0,0	operasi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.QHD.004.052	Pelaksanaan Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster	0,0	operasi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03.QHD.004.053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster	0,0	operasi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan				77.127.035,0				106.105.155,0	99.253.155,0	43.412.683,0
04.CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		Unit		1.000.000,0				0,0	0,0	0,0
04.CAL.001	Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan	27	Unit		1.000.000,0	27	27	27	0,0	0,0	0,0
04.CAL.001.051	Pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan sumber daya kelautan	0,0	unit	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.CBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		Unit		0,0				10.490.034,0	3.575.034,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
04.CBQ.001	Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun	0	Unit		0,0	10	10	8	10.490.034,0	3.575.034,0	0,0
04.CBQ.001.051	Perencanaan Pembangunan Prasarana Pendukung Pengawasan SDKP	4,0	Laporan	0,0	0,0	7,0	7,0	1,0	189.895,0	100.000,0	0,0
04.CBQ.001.052	Pembangunan Prasarana Pendukung Pengawasan SDKP	4,0	Dokumen	0,0	0,0	7,0	7,0	1,0	9.996.780,0	3.275.400,0	0,0
04.CBQ.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Pendukung Pengawasan SDKP	4,0	Laporan	0,0	0,0	7,0	7,0	1,0	303.359,0	199.634,0	0,0
04.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		Unit		0,0				0,0	0,0	0,0
04.RAL.001	Kapal Pengawas	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.001.051	Perencanaan Pengadaan Kapal Pengawas	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
04.RAL.001.052	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	0,0	Unit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.001.055	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan (ABT)	0,0	Unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.002	Speedboat Pengawas	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.002.051	Perencanaan Pengadaan Speedboat Pengawas	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.002.052	Pengadaan Speedboat Pengawas Perikanan	0,0	Unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.002.053	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Speedboat Pengawas	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		Unit		9.500.000,0				5.965.121,0	6.028.121,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
04.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	9	Unit		9.500.000,0	7	7	7	5.965.121,0	6.028.121,0	0,0
04.RBQ.001.051	Perencanaan Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	4,0	Laporan	135.947,5	543.790,0	4,0	4,0	0,0	106.500,0	169.500,0	0,0
04.RBQ.001.052	Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	4,0	Unit	1.849.815,0	7.399.260,0	4,0	4,0	0,0	5.698.678,0	5.698.678,0	0,0
04.RBQ.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	4,0	Laporan	389.237,5	1.556.950,0	4,0	4,0	0,0	159.943,0	159.943,0	0,0
04.RBQ.001.057	Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (ABT)	0,0	Unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RCG	OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Unit		66.627.035,0				89.650.000,0	89.650.000,0	43.412.683,0
04.RCG.001	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	122	Unit		66.627.035,0	125	125	125	89.650.000,0	89.650.000,0	43.412.683,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
04.RCG.001.051	Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	15,0	Laporan	53.164,0	797.460,0	15,0	15,0	0,0	644.040,0	644.040,0	633.780,0
04.RCG.001.052	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	125,0	Unit	521.505,9	65.188.235,0	125,0	125,0	0,0	88.605.250,0	88.605.250,0	42.388.453,0
04.RCG.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	15,0	Laporan	42.756,0	641.340,0	15,0	15,0	0,0	400.710,0	400.710,0	390.450,0
Total					442.334.722,0	-	-	-	595.614.048,0	588.762.047,0	606.784.656,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PSDKP		520.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520.000,0
02.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
02.ABW.001.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada serta Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
02.ABW.001.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada serta Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
02.ABW.001.053	Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada serta Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
02.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		220.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.AFA.001	NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP		220.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220.000,0
02.AFA.001.051	Persiapan Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
02.AFA.001.052	Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	Utama	120.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120.000,0
02.AFA.001.053	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
03	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif		236.212.818,0	128.474.869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	364.687.687,0
03.BKB	Pemantauan produk		1.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300.000,0
03.BKB.001	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipantau		1.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.BKB.001.051	Perencanaan Supervisi Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pendukung	107.445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107.445,0
03.BKB.001.052	Pelaksanaan BIMTEK Pemantauan, Operasi Armada dan Pembangunan Infrastruktur	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BKB.001.053	Pelaksanaan Supervisi Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Utama	389.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	389.190,0
03.BKB.001.054	Monitoring, Evaluasi Supervisi Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pendukung	803.365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803.365,0
03.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		592.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592.000,0
03.FBA.001	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada		592.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.FBA.001.051	Perencanaan Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pemantauan dan Operasi Armada	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
03.FBA.001.052	Pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pemantauan dan Operasi Armada	Utama	392.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392.000,0
03.FBA.001.053	Monitoring Evaluasi Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pemantauan dan Operasi Armada	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
03.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		234.320.818,0	128.474.869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362.795.687,0
03.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas		180.910.618,0	128.474.869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309.385.487,0
03.QHD.001.051	Perencanaan Operasi Kapal Pengawas	Utama	144.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144.140,0
03.QHD.001.052	Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas	Utama	180.194.138,0	128.474.869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308.669.007,0
03.QHD.001.053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Kapal Pengawas	Utama	572.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572.340,0
03.QHD.002	Operasi Pesawat Patroli		43.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43.000.000,0
03.QHD.002.051	Perencanaan Operasi Pengawasan SDKP Melalui Udara	Utama	20.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.040,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.QHD.002.052	Operasional Pengawasan SDKP Melalui Udara	Utama	42.970.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.970.720,0
03.QHD.002.053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Pengawasan SDKP Melalui Udara	Utama	9.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.240,0
03.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas		10.410.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.410.200,0
03.QHD.003.051	Perencanaan Operasi Speedboat Pengawas	Utama	119.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119.000,0
03.QHD.003.052	Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas	Utama	10.172.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.172.200,0
03.QHD.003.053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas	Utama	119.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119.000,0
03.QHD.004	Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.QHD.004.051	Perencanaan Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.QHD.004.052	Pelaksanaan Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.QHD.004.053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan		77.127.035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77.127.035,0
04.CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
04.CAL.001	Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan		1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
04.CAL.001.051	Pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan sumber daya kelautan	Pendukung	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
04.CBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.CBQ.001	Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.CBQ.001.051	Perencanaan Pembangunan Prasarana Pendukung Pengawasan SDKP	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.CBQ.001.052	Pembangunan Prasarana Pendukung Pengawasan SDKP	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.CBQ.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Pendukung Pengawasan SDKP	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.001	Kapal Pengawas		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.001.051	Perencanaan Pengadaan Kapal Pengawas	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.001.052	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.001.055	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan (ABT)	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.002	Speedboat Pengawas		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.002.051	Perencanaan Pengadaan Speedboat Pengawas	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.002.052	Pengadaan Speedboat Pengawas Perikanan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.002.053	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Speedboat Pengawas	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		9.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun		9.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.500.000,0
04.RBQ.001.051	Perencanaan Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	Utama	543.790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	543.790,0
04.RBQ.001.052	Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	Utama	7.399.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.399.260,0
04.RBQ.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	Utama	1.556.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.556.950,0
04.RBQ.001.057	Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (ABT)	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RCG	OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		66.627.035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66.627.035,0
04.RCG.001	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat		66.627.035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66.627.035,0
04.RCG.001.051	Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	Utama	797.460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	797.460,0
04.RCG.001.052	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	Utama	65.188.235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.188.235,0
04.RCG.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	Utama	641.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	641.340,0
Total			313.859.853,0	128.474.869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442.334.722,0

